

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PROGRAM PENDAMPING DESA “KUKAR IDAMAN”
(PENDEKAR IDAMAN) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Muhammad Ansarullah, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pendamping Desa “Kukar Idaman” (Pendekar Idaman) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Muhammad Ansarullah

NIM : 2102016042

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 22 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. Santi Rande, M. Si
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 2

Tahun : 2025

Halaman : 402-412

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING DESA “KUKAR IDAMAN” (PENDEKAR IDAMAN) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Ansarullah ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Pendamping Desa/Kelurahan “Kukar Idaman” (Pendekar Idaman) merupakan program pendampingan yang dibentuk melalui SK Bupati Kutai Kartanegara untuk mendukung pembinaan, pengawasan, dan evaluasi program desa, penggunaan dana, serta pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat, mengetahui dan menggambarkan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program Pendekar Idaman Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Pendamping Desa/Kelurahan “Kukar Idaman” (Pendekar Idaman) khususnya di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pendekar Idaman ialah masih adanya keterbatasan sumber daya manusia pendamping desa, kondisi geografis desa yang terlalu luas dengan jumlah RT yang relative banyak, keterbatasan kualitas dan kapasitas pendamping desa yang direkrut serta komunikasi yang kurang efektif dengan lembaga masyarakat desa menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pendekar Idaman.

Kata Kunci : Faktor Penghambat, Pendekar Idaman, Kukar Idaman, Desa Loa Lepu

Pendahuluan

Pembangunan desa kini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia saat ini dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dipandang sebagai proses sadar, terstruktur, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mhd.ansarullah@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

(Saputra, 2022). Pergeseran peran desa dari objek menjadi subjek pembangunan memberikan otonomi lebih bagi desa dalam mengelola sumber daya lokal dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rozi, 2022). Paradigma baru ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan (Setiawan dkk., 2020).

Desa memiliki potensi besar sebagai motor penggerak pembangunan lokal, terutama melalui optimalisasi sumber daya manusia dan alam yang dimilikinya (Tjilen, 2023). Namun demikian, pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti lemahnya pemahaman tentang tata kelola pemerintahan, keterbatasan sumber daya, serta persoalan administratif. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kapasitas aparatur desa, kehadiran pendamping yang kompeten, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Ikrom dkk., 2021).

Tabel 1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal
209	364	263	5

Sumber : www.dpmpd.kaltimprov.go.id

Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) Kalimantan Timur Tahun 2024 menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan desa di wilayah tersebut masih belum merata, dengan 263 desa masih berada pada kategori Desa Berkembang (DPMPD Kaltim, 2024). Menyikapi hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan kebijakan strategis berupa Program Pendampingan desa melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur tentang pembentukan dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman dengan tujuan mendukung pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa, termasuk pengelolaan dana dan keuangan desa, agar lebih transparan dan tepat sasaran. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di wilayah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Program Pendekar Idaman belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa permasalahan ditemukan, baik di tingkat pelaksana program dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai reading sektor maupun pada target sasaran program, seperti di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang. Berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia pendamping, minimnya koordinasi, hingga kerumitan petunjuk teknis, menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat

dalam pelaksanaan Program Pendekar Idaman di Desa Loa Lepu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam upaya penyempurnaan kebijakan pendampingan desa serta penguatan kapasitas tata kelola pembangunan di tingkat desa.

Kerangka Dasar Teori

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan cabang studi dalam ilmu administrasi yang berfokus pada sistem dan mekanisme administratif untuk mendorong pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik secara terencana, khususnya di negara-negara berkembang (Kartasmita dalam Ngusmanto, 2015). Konsep ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, optimalisasi sumber daya, serta sinergi antara politik dan administrasi dalam menciptakan perubahan yang progresif dan berkeadilan.

Menurut Riggs, administrasi pembangunan adalah sarana administratif untuk mencapai tujuan pembangunan, yang kerap dikaitkan dengan upaya negara maju dalam membantu negara-negara miskin. Sementara Moore et al. (2019) menyoroti lima tujuan utama administrasi pembangunan, yaitu: inovasi perencanaan, pembangunan akar rumput, pengembangan sumber daya manusia, harmonisasi politik dan administrasi, serta kebebasan birokrasi dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.

Siagian (2005) dan Tjokroamidjojo (1995) sepakat bahwa administrasi pembangunan merupakan proses sadar dan terencana oleh pemerintah untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks lokal, administrasi pembangunan juga relevan diterapkan di desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Jayaditana (2006) menyebut bahwa pembangunan desa mencakup dimensi ekonomi, sosial, fisik, prasarana, dan pemerintahan, yang kesemuanya memerlukan tata kelola yang baik agar tujuan pembangunan tercapai secara menyeluruh.

Dengan demikian, administrasi pembangunan dalam hal ini dipahami sebagai rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan proses strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks otonomi desa, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat desa sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Hal ini menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa, yang meskipun menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi, juga menyimpan potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang besar.

Menurut Siagian (2005), pembangunan desa melibatkan serangkaian upaya sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kualitas hidup dan pelayanan dasar. Kartasmita (2001) menekankan bahwa inti pembangunan terletak pada manusia itu sendiri, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat desa merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional.

Pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya inisiatif, kemandirian, dan kreativitas masyarakat desa. Masyarakat desa berperan ganda sebagai penerima manfaat dan penggerak utama pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan, di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengawas proses pembangunan di tingkat lokal. Secara praktis, tujuan pembangunan desa mencakup peningkatan pelayanan pertanahan, penguatan pengelolaan ruang, pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan perencanaan lokal, dan penguatan ekonomi wilayah tertinggal.

Kawasan pedesaan memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan nasional karena potensi ekonominya dan jumlah penduduknya yang dominan. Dengan demikian, pembangunan desa bukan sekadar kegiatan teknokratis, tetapi merupakan proses sosial yang membutuhkan kolaborasi, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai inti dari transformasi menuju desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Pendekar Idaman

Program Pendamping Desa dan Kelurahan (Pendekar Idaman) merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung visi dan misi kepala daerah periode 2021–2026 melalui pilar Dedikasi Kukar Bebaya dalam Program Kukar Idaman. Program ini dirancang sebagai gerakan transformatif yang melampaui sekadar pendampingan administratif, dengan menempatkan pendamping sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa dan kelurahan.

Pendamping Desa/Kelurahan “Kukar Idaman” (Pendekar Idaman) adalah program pendampingan yang dibentuk melalui SK Bupati atau Kepala DPMD Kutai Kartanegara untuk mendukung pembinaan, pengawasan, dan evaluasi program desa, penggunaan dana, serta pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014, pendampingan ini bertujuan memberdayakan masyarakat desa melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan, dengan dukungan tenaga profesional, kader pemberdayaan, atau pihak ketiga.

Sebagai wujud pendekatan kolaboratif, Pendekar Idaman mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Model ini selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif yang menekankan pemberdayaan masyarakat,

inklusivitas, dan penguatan tata kelola lokal. Fokus utama program ini adalah memberikan dukungan teknis, manajerial, dan administratif kepada aparaturnya serta masyarakat desa dan kelurahan, dengan tujuan mendorong inovasi, kemandirian, dan pembangunan berbasis potensi lokal.

Program ini juga bertujuan membentuk sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan lingkungan sosial yang berdaya, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pendekar Idaman tidak hanya menjadi instrumen pendampingan, tetapi juga simbol perjuangan kolektif dalam membangun desa dan kelurahan yang mandiri, responsif terhadap tantangan lokal, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

Definisi Konseptual

Menurut Henryk 2013 dalam Sofian (2012) Definisi konseptual merupakan batasan pengertian suatu konsep sehingga memberi pemahaman mengenai objek yang dibutuhkan dan mendapatkan batasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti. Analisis faktor penghambat pelaksanaan program pendampingan desa adalah sebuah gambaran untuk menjelaskan mengenai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pendampingan desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan berfokus pada faktor-faktor yang menghambat implementasi program Pendampingan Desa/Kelurahan “Kukar Idaman” (Pendekar Idaman) khususnya di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dirancang untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang terjadi serta alasan di balik fenomena tersebut (Wahyudin, 2017). Jenis penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dengan tujuan utama menemukan masalah yang terjadi

Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri atas hasil wawancara dari *key informan*, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kutai Kartanegara. Selanjutnya, sumber data sekunder terdiri dari Peraturan Bupati, Juklak dan Juknis, buku-buku ilmiah, jurnal dan literatur lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pendampingan Desa “Kukar Idaman” (Pendekar Idaman) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Keterbatasan Jumlah Tenaga Pendamping

Dalam berjalannya program, efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan tenaga yang cukup, kejelasan tugas dan fungsi, kapasitas individu, serta dukungan fasilitas yang memadai. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah pendamping desa dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang harus didampingi, sehingga beban kerja yang tinggi menjadi salah satu kendala dalam efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini selaras dengan hasil temuan penelitian oleh Dianto (2019) yang mengungkapkan bahwa jumlah pendamping desa yang tidak sebanding dengan jumlah desa menyebabkan tidak efektifnya kerja pendamping desa, karena beban kerja yang tidak sebanding dengan tenaga yang tersedia membuat pendamping desa tidak optimal dalam menjalankan tugas.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam organisasi Pendekar Idaman menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Pendekar Idaman. Jumlah tenaga pendamping yang masih belum sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang harus didampingi menyebabkan tingginya beban kerja, sehingga pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas program, di mana pendamping desa menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan jumlah tenaga kerja serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mendesak untuk memastikan keberhasilan program dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan.

2. Kondisi Geografis Wilayah Desa

Pelaksanaan Program Pendekar Idaman di wilayah Kutai Kartanegara, khususnya di Desa Loa Lepu, menghadapi tantangan signifikan yang bersumber dari kondisi geografis wilayah. Secara administratif, beberapa desa memiliki struktur kewilayahan yang kompleks, dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) yang sangat besar—bahkan mencapai lebih dari 70 RT dalam satu desa. Kompleksitas ini berdampak langsung pada intensitas dan cakupan kerja yang harus dijalankan oleh para pendamping.

Di sisi lain, kondisi geografis juga menjadi hambatan serius dalam implementasi program. Wilayah pesisir, kepulauan, dan desa-desa dengan akses terbatas memerlukan waktu tempuh yang panjang serta biaya operasional yang tidak sedikit. Akibatnya, kehadiran dan efektivitas pendamping menjadi tidak maksimal, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan kehadiran fisik secara rutin. Permasalahan ini diperparah oleh kebijakan insentif yang bersifat seragam. Pendamping yang bertugas di wilayah dengan medan berat menerima insentif yang sama dengan mereka yang bekerja di daerah yang relatif mudah dijangkau. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengunduran diri pendamping.

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa kondisi geografis wilayah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan program. Implementasi program berbasis desa seharusnya mempertimbangkan variasi karakteristik lokal sebagai bagian dari desain kebijakan. Pendekatan yang adaptif dan kontekstual diperlukan agar distribusi sumber daya, dukungan, dan insentif dapat lebih adil dan berdampak maksimal.

3. *Kualitas dan Kapasitas Tenaga Pendamping*

Selain dari aspek kuantitas, kualitas tenaga pendamping juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program Pendekar Idaman. Tidak semua pendamping memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan desa. Ketimpangan kompetensi ini berdampak pada kurang optimalnya proses fasilitasi, edukasi, dan pemberdayaan yang seharusnya menjadi inti dari kegiatan pendampingan.

Meskipun telah diselenggarakan pelatihan seperti in-service training (IST) dan rapat koordinasi secara rutin, namun program peningkatan kapasitas ini masih bersifat normatif dan belum menjawab kebutuhan teknis maupun sosial di lapangan secara spesifik. Akibatnya, beberapa pendamping mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas strategis yang memerlukan pemahaman lintas sektor, komunikasi yang adaptif, serta keterampilan dalam memediasi kepentingan antar pemangku kepentingan desa.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Lipsky (1980) tentang street-level bureaucracy, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan diskresi aktor pelaksana di tingkat lapangan. Dalam hal ini, tenaga pendamping merupakan garda terdepan yang menghubungkan kebijakan makro dengan kondisi mikro masyarakat desa. Oleh karena itu, apabila tenaga pelaksana tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai, maka efektivitas program akan terhambat, sekalipun desain kebijakannya sudah tepat.

4. *Ketimpangan Beban Kerja dan Kompensasi Tenaga Pendamping*

Salah satu persoalan krusial yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Pendekar Idaman adalah ketimpangan antara beban kerja tenaga pendamping dengan kompensasi yang diterima. Secara tertulis berdasarkan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Program, Pendekar Idaman memiliki 15 poin tugas umum dan 9 poin tugas khusus yang wajib dipenuhi dalam menjalankan peran mereka. Tugas tersebut mencakup kegiatan seperti perencanaan pembangunan desa, pelaporan, fasilitasi kegiatan pemberdayaan, pendataan, hingga membina hubungan kerja dengan aktor-aktor desa lainnya. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pendamping yang kesulitan untuk memenuhi seluruh poin tersebut secara optimal. Keterbatasan waktu, cakupan wilayah kerja yang luas, serta minimnya dukungan administratif menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang dengan kapasitas yang tersedia.

Disisi lain dalam berjalannya program, ditemukan bahwa banyak tenaga pendamping harus menangani lebih dari satu desa dalam waktu bersamaan. Beban

kerja ini tidak hanya mencakup aspek fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga aspek administratif dan teknis yang menuntut keterlibatan intensif. beban kerja yang tinggi ini tidak diimbangi dengan sistem insentif yang adil dan proporsional. Semua pendamping menerima jumlah insentif yang sama, tanpa mempertimbangkan jumlah wilayah kerja yang ditangani, tingkat kesulitan geografis, atau kompleksitas permasalahan di desa dampingan. Ketidakseimbangan ini menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan pendamping, yang merasa bahwa dedikasi mereka tidak dihargai secara layak.

Dalam banyak kasus, ketidakpuasan tersebut berujung pada keputusan pendamping untuk mengundurkan diri. Tidak sedikit dari mereka yang memilih menerima tawaran menjadi pegawai tetap di pemerintah desa, yang dianggap lebih menjanjikan dari sisi kestabilan pekerjaan dan keseimbangan beban kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan dan pengakuan terhadap kerja pendamping masih menjadi kelemahan dalam desain program. Pengunduran diri yang terjadi secara tiba-tiba berdampak serius terhadap kelangsungan program. Kekosongan tenaga pendamping menyebabkan terhambatnya proses fasilitasi, pendampingan, dan pelaporan, sehingga program kehilangan kontinuitas dan efektivitas dalam jangka pendek. Hal ini juga memperlihatkan lemahnya sistem mitigasi dalam mengantisipasi dinamika kepegawaian di lapangan.

Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam program. Skema kompensasi perlu disesuaikan dengan beban kerja dan karakteristik wilayah kerja. Selain itu, perlu dibangun sistem insentif non-finansial seperti peluang pengembangan kapasitas, pengakuan kinerja, dan jalur karier yang lebih jelas, agar para pendamping memiliki motivasi jangka panjang dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, permasalahan ketimpangan beban kerja dan kompensasi bukan hanya soal kesejahteraan pendamping, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan dan keberhasilan Program Pendekar Idaman secara keseluruhan.

5. Komunikasi yang Kurang Efektif antar pelaksana program

Selain persoalan teknis dan sumber daya manusia, kendala komunikasi juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Program Pendekar Idaman, khususnya di Desa Loa Lepu. Hubungan antara pendamping desa dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti RT, BPD, hingga Posyandu belum berjalan secara efektif. Padahal, kerja sama antaraktor desa merupakan kunci penting dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan.

Salah satu penyebabnya adalah kesulitan menjalin komunikasi secara langsung. Banyak anggota lembaga masyarakat yang memiliki kesibukan dan waktu terbatas, sehingga menyulitkan pertemuan tatap muka yang idealnya menjadi ruang dialog dan koordinasi. Untuk mengatasi hal ini, pendamping biasanya mencoba menggunakan media komunikasi digital seperti WhatsApp. Namun sayangnya, komunikasi melalui pesan singkat ini sering kali tidak

direspons dengan baik atau bahkan diabaikan, sehingga pesan tidak sampai secara utuh dan koordinasi pun terhambat. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

Program pemberdayaan masyarakat seperti Pendekar Idaman sangat bergantung pada komunikasi yang lancar dan partisipasi aktif dari seluruh elemen desa. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka proses koordinasi pun menjadi lemah, dan akhirnya program sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Penelitian oleh Noviantama (2017) juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh saluran komunikasi yang digunakan, seberapa jelas pesan yang disampaikan, serta tingkat keterlibatan para aktor yang terlibat. Dalam konteks ini, terlihat bahwa komunikasi belum dilakukan secara optimal baik dari sisi media yang digunakan maupun komitmen antar pihak.

Oleh karena itu, membangun pola komunikasi yang lebih efektif dan menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Selain memaksimalkan penggunaan media digital, pendamping juga perlu mendorong dialog langsung secara berkala dan membangun kepercayaan dengan lembaga desa. Dengan begitu, komunikasi bisa menjadi jembatan kolaborasi, bukan justru menjadi penghalang dalam pelaksanaan program.

Penutup

Kesimpulan

Faktor penghambat dalam implementasi Program Pendekar Idaman adalah masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, kondisi geografis desa yang terlalu luas dengan jumlah RT yang relatif banyak menjadi tantangan tersendiri dalam jangkauan pelayanan pendampingan. Ketimpangan beban kerja dan kompensasi Tenaga Pendamping juga menjadi persoalan, banyak pendamping harus menangani lebih dari satu desa, sementara beban kerja administratif, teknis, dan sosial yang mereka emban sangat tinggi, mencakup 15 tugas umum dan 9 tugas khusus yang harus dipenuhi. Selain itu, kapasitas dan kompetensi teknis pendamping yang direkrut belum sepenuhnya memadai, serta kurangnya efektivitas komunikasi dan koordinasi antara pendamping dengan lembaga masyarakat desa turut memperlambat keberhasilan pelaksanaan program.

Saran

Berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan dalam implementasi Program Pendekar Idaman, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program ke depan antara lain:

1. Penambahan dan Pemerataan Tenaga Pendamping

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu melakukan evaluasi terhadap rasio jumlah tenaga pendamping dengan wilayah kerja yang dibebankan. Penempatan pendamping sebaiknya disesuaikan dengan luas wilayah desa, jumlah RT, dan tingkat kompleksitas sosial masyarakat, guna memastikan jangkauan pelayanan yang optimal.

2. Penguatan Kompetensi Teknis dan Sosial Pendamping.
Pelatihan berkelanjutan harus diberikan kepada pendamping, baik dalam bentuk in-service training maupun workshop tematik, guna meningkatkan kapasitas teknis dan sosial mereka. Materi pelatihan dapat mencakup manajemen pembangunan desa, pendekatan partisipatif, teknik komunikasi efektif, serta pengelolaan konflik di tingkat lokal.
3. Penguatan Sistem Komunikasi dan Koordinasi.
Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara pendamping dan lembaga masyarakat desa seperti RT, BPD, dan Posyandu. Selain media digital, perlu difasilitasi pertemuan tatap muka secara berkala untuk membangun kedekatan, kepercayaan, dan koordinasi lintas aktor yang lebih efektif.
4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kepastian Karier Pendamping.
Untuk menghindari tingginya angka pengunduran diri, program sebaiknya menyediakan jalur karier yang jelas serta membuka peluang afirmatif bagi pendamping untuk diangkat sebagai tenaga tetap, dengan mempertimbangkan kinerja dan masa kerja. Hal ini akan memperkuat keberlanjutan program dan mencegah kekosongan tenaga di tengah pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Dianto, I. (2019). Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 18(2), 239. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>
- Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 15–21. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jppm/article/view/2577>
- Imanuddin Hasbi, Hartoto, Dyah Maharani, Sriyani, Ella Dewi Latifah, Ardhana Januar Mahardhani, Indri Arrafi J, Hikmah Nurain, Attifah Meita Rahmah, Ahmad Subagiyo, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Charia Roswita, Renaldy Lukmanul Hakim, Khairul Rij, F. S. D. P. (2021). *Kebijakan Publik* (Issue julli).
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif* (Vol. 1).
- Noviantama, Y. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Skripsi*, 13(3), 1576–1580.

- Rozi, F. F. (2022). Komunikasi Pembangunan Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi Sebagai Desa Wisata Budaya. *Commercium*, 5(3), 57–67.
- Saputra, R. (2022). Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1223–1237. <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/254%0Ahttps://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/254/213>
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi Potensi Desa Wisata (Alexander Phuk Tjilen, dkk.) | 38 Nanggroe. *Naggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8373947>